

## Kapolda Jabar: Percepat Vaksinasi Booster di Bogor

**BOGOR (IM)**- Kapolda Jabar, Irjen Suntana meminta target vaksinasi booster di Kota Bogor capai 50% dalam waktu dekat. Hal itu guna mencegah meningkatnya kasus Covid-19 di Kota Bogor, kata

Kapolda Jabar, Irjen Suntana saat meninjau vaksinasi massal di Alun-alun Kota Bogor, Selasa (2/8).

Ia menilai, wilayah Bogor ini berada di daerah perlintasan mobilitas warga Jabodetabek. Untuk itu, vaksin booster harus ditingkatkan untuk mencegah paparan Covid-19 yang dalam beberapa pekan terakhir meningkat.

"Kegiatan vaksinasi terus dilaksanakan karena Covid-19 belum selesai. Angka kenaikan kasus di masyarakat yang terkena Covid-19, seminggu terakhir mengalami kenaikan," kata Suntana.

Saat ini, capaian vaksin booster Kota Bogor per Senin, (1/8), telah mencapai 329.694 orang atau 40,3% dari jumlah sasaran sebanyak 819.444 orang.

"Untuk angka vaksinasi di Kota Bogor sendiri sudah luar biasa, sudah top lah. Mudah-mudahan dalam waktu dekat vaksin ketiga ini

bisa tembus di angka 50% sampai 70%," katanya.

Suntana pun mengapresiasi Polresta Bogor Kota yang terus aktif melakukan sosialisasi dan turut serta terlibat vaksinasi ketiga booster di lokasi-lokasi area publik seperti mal, taman kota, atau di ruas jalan.

"Kami berterima kasih kepada pak kapoldes dan teman teman pemda untuk melaksanakan vaksinasi booster," imbuh Suntana.

Kapolda Jabar juga terus mengingatkan agar masyarakat tidak abai dengan protokol kesehatan atau terus menggunakan masker, baik di dalam atau luar ruangan.

Vaksinasi dosis ketiga booster Polresta akan terus dilakukan selama satu pekan ke depan di lokasi Alun-alun Kota Bogor dengan target sasaran 700 orang setiap hari.

Salah satu pedagang di area alun-alun, Anwar (33), menuturkan, dirinya baru mendaftar vaksin booster hari ini, lantaran beberapa waktu lalu waktunya tidak ada.

"Baru bisa hari ini, untung dekat dengan tempat berdagang jadi bisa lah, tinggal 30 menit doang," katanya. ● **gio**

## Warga Pondok Aren Keluhkan Jalan Raya Ceger Terendam Selama 7 Bulan

### TANGSEL (IM)

Genangan air yang tak kunjung surut mengganggu pengendara motor di Jalan Raya Ceger RT 5 RW 4 Kelurahan Jurangmangu Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan.

"Melihat jalan seperti ini risih banget, sepanjang jalan raya Ceger cuma di sini aja yang jalannya tergenang air selokan. Kalau nyiprat juga kotor, karena air selokan," kata warga setempat, Arul Amrullah (48) di Pondok Aren, Selasa (2/8).

Dengan adanya genangan air ini, Arul khawatir pengendara motor yang melintas tidak melihat lubang akibat aspal yang terkelupas karena terkikis air.

"Sering di sini orang naik motor jatuh karena permukaan jalan tertutup air selokan. Jadi pengendara enggak tau jalan yang rata sama yang

tidak rata," ujarnya.

Selain membahayakan pengendara motor, jalan yang terendam air selokan ini juga menimbulkan kemacetan karena pengendara mengurangi laju kendaraan.

"Kalau macet ya sering karena mobil atau motor pada pelan-pelan jalannya, ini memang airnya sering disedot pakai mesin, tapi air ya balik lagi terus," kata Arul.

Beberapa pengendara motor yang melintas terlihat menghindari jalan yang tergenang air. Mereka memilih melintas di atas trotoar.

"Kurang lebih kondisi seperti ini sudah tujuh bulan, pernah dibenerin ya tapi kita lihat sendiri kondisinya sekarang masih ada genangan air. Mana ini air got kalau nyiprat kotor, saya berharap cepet dibetulin aja deh," kata Arul. ● **PP**

## Belum Merdeka, Rachmat Yasin

### Wajib Lapor ke Bapas 2 Minggu Sekali

**BOGOR (IM)**-Mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin diwajibkan lapor ke Badan Pemasarakatan (Bapas) Kelas II Bogor sekali dalam kurun waktu dua minggu, setelah mendapatkan bebas bersyarat dari Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

"Rachmat Yasin setelah mendapatkan bebas bersyarat dari Kemenkumham, melalui Direktorat Jenderal Pemasarakatan akan dikenakan wajib lapor sekali dalam kurun waktu dua minggu," ucap Kepala Sater Bapas Kelas II Bogor, Teolina Saragih kepada wartawan, Selasa (2/8).

Seperti diketahui hari ini Rachmat Yasin bebas dari Lapas Sukamiskin. Dia dikeluarkan dengan status bebas bersyarat dan menerima remisi setelah menghabiskan sisa masa penahanan selama dua tahun dan delapan bulan atas kasus gratifikasi.

Setelah beberapa waktu, Rachmat Yasin akan dikenakan wajib lapor satu kali dalam kurun waktu sebulan. Setelah berkelakuan baik dan memenuhi persyaratan.

"Selain wajib lapor, Rachmat Yasin selaku klien pemasarakatan Bapas Kelas II Bogor juga diminta tidak

melanggar hukum lagi, aktif atau berbau dengan masyarakat, mengikuti program-program kami, menebarkan ilmu, memberikan pelatihan dan lainnya," sambung Teolina Saragih.

Selama menjadi klien Bapas Kelas II Bogor, Rachmat Yasin boleh keluar kota maupun keluar negeri, asalkan memenuhi syarat-syarat atau prosedur yang sudah diatur oleh Kemenkumham.

"Klien pemasarakatan boleh ke luar kota kalau sudah izin ke pembimbing kemasyarakatan dan Bapas Kelas II Bogor, lalu kalau ingin keluar negeri maka harus mendapatkan izin dari Kemenkumham dan termasuk Imigrasi. Selain itu harus mengisi daftar tujuan, melapor saat tiba di tempat tujuan dan melapor kembali saat tiba di Bogor," tutur wanita yang pernah bertugas di Lapas Kelas II Pondok Rajeg ini.

Saat keluar kota maupun keluar negeri, klien pemasarakatan tidak perlu jaminan dari kuasa hukumnya. Teolina meminta Rachmat Yasin yang pernah mendapatkan bebas bersyarat di Tahun 2019 lalu mentaati atau patuh melaksanakan aturan yang berlaku. ● **gio**

**PENGUMUMAN PELAKSANAAN PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF ('KIK') DAN PROSPEKTUS REKSA DANA SYAILENDRA MONEY MARKET FUND 8**

Menindaklanjuti rencana perubahan KIK dan Prospektus REKSA DANA SYAILENDRA MONEY MARKET FUND 8 yang telah diumumkan melalui surat kabar harian "International Media" tertanggal 24 Januari 2022, kami, PT Syailendra Capital selaku Manajer Investasi dari REKSA DANA SYAILENDRA MONEY MARKET FUND 8, dengan ini bermaksud menyampaikan pelaksanaan perubahan Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") dan Prospektus REKSA DANA SYAILENDRA MONEY MARKET FUND 8 sebagaimana termaktub dalam akta Addendum REKSA DANA SYAILENDRA MONEY MARKET FUND 8.

Rincian perubahan ketentuan dalam KIK dan Prospektus tersebut di atas dapat diperoleh di Manajer Investasi.

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada para Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA MONEY MARKET FUND 8 serta pihak-pihak yang berkepentingan.

**SYAILENDRA**  
Jakarta, 3 Agustus 2022

Manajer Investasi  
**REKSA DANA SYAILENDRA MONEY MARKET FUND 8**  
PT Syailendra Capital  
bertizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

# 8 | Nusantara



## VAKSINASI BOOSTER KEDUA BAGI NAKES DI RS MATA CICENDO

Vaksinasi booster COVID-19 kedua kepada seorang tenaga kesehatan di RS Mata Cicendo, Bandung, Jawa Barat, Selasa (2/8). Vaksinasi dosis keempat tersebut menargetkan sebanyak 700 sumber daya manusia (SDM) kesehatan di rumah sakit itu dengan ketersediaan 30 dosis vaksin per hari.

## BAKAL DIHADIRI PARA PEMIMPIN KOTA DUNIA

# Bandung Siap Gelar Urban 20

Urban 20 merupakan pertemuan para pemimpin kota dunia untuk membahas isu-isu perkotaan, termasuk isu ketahanan pangan. Acara ini sebagai bagian dari agenda Presidensi G20 Indonesia.

**BANDUNG (IM)**- Kota Bandung akan menjadi tuan rumah Konferensi Internasional Ketahanan Pangan bertajuk Urban 20, 3-4 Agustus mendatang.

Urban 20 merupakan pertemuan para pemimpin kota dunia untuk membahas isu-isu perkotaan, termasuk isu ketahanan pangan. Acara ini sebagai bagian dari agenda Presidensi G20 Indonesia.

Kepala Dinas Ketahanan

Pangan dan Pertanian Kota Bandung, Gin Gin Ginanjjar mengatakan, Kota Bandung terpilih menjadi tuan rumah karena dianggap sukses membangun konsep ketahanan pangan mandiri melalui program Buruan SAE.

"Isu pangan ini menjadi agenda G20. Kita diberikan kesempatan untuk menyelenggarakan agenda internasional di 3-4 Agustus 2022," kata Gin Gin.

"Buruan SAE ini juga telah menjadi perhatian teman teman kita dari luar negeri, sebagai konsep ketahanan pangan mandiri," imbuhnya.

Urban 20 kali ini mengambil tema meningkatkan ketahanan pangan kota dan menciptakan future work melalui urban farming yang berbasis budaya dan teknologi.

Forum tersebut mencoba merumuskan gagasan dan solusi mengenai isu Ketahanan Pangan yang akan dibahas pada Presidensi G20.

"Hasil output dari kegiatan ini, akan menjadi input bagi pembahasan di G20," katanya.

Hari pertama, 3 Agustus 2022 akan digelar konferensi internasional menghadirkan berbagai pembicara internasional di Auditorium Ams Geise Universitas Parahyan-

gan Kota Bandung.

Nantinya, selain melakukan konferensi, di hari kedua, 4 Agustus 2022 para peserta juga akan diajak mengunjungi beberapa Buruan SAE di Kota Bandung.

Rutenya mulai dari Balai Kota Bandung, lalu menuju Buruan Sae Sawargi RW 10 Kelurahan Sarijadi Kecamatan Sukasari dan Buruan Sae Padjajaran Lestari Kelurahan Pajajaran Kecamatan Cicendo serta terakhir di DKPP Kota Bandung.

Acara ini, kata Gin Gin didukung penuh oleh Milan Urban Food Policy Pact (MUFPP), Uni Eropa dan beberapa lembaga internasional lainnya.

Untuk diketahui, Kota Bandung merupakan ketua Milan Urban Food Policy Pact

(MUFPP) regional Asia Pasifik.

MUFPP merupakan pertemuan para wali kota atau utusan kota dunia di Milan, Italia telah melahirkan Milan Urban Food Policy Pact (Pakta Kebijakan Pangan Perkotaan).

Pakta Milan adalah perjanjian internasional untuk mewujudkan kota cerdas pangan bagi warganya. Sejauh ini sudah lebih dari 200 kota yang menandatangani pakta tersebut.

Urban 20 akan dihadiri oleh 250 peserta baik dari dalam negeri maupun mancanegara.

"Kita didukung penuh oleh MUFPP. Mereka akan mengundang semua anggota MUFPP khususnya regional Asia Pasifik dan akan menghadirkan tiga pejabat selvel Wali Kota," ujarnya. ● **pur**

## Bersinergi Bantu Masyarakat tak Mampu

**BOGOR (IM)**- Untuk membantu meringankan dan memenuhi kebutuhan masyarakat kurang mampu di Kabupaten Bogor, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bersama dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Rabbani bersinergi melakukan kegiatan Bantuan Sosial bagi masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PKKS) di Kabupaten Bogor, di Dinas Sosial Kabupaten Bogor, Senin (1/8), kemarin.

Graha Pancakarsa sejak diresmikan tahun 2020 telah menumbuhkan kesejahteraan sosial Puskesmas SLMP di 324 desa dan kelurahan se-Kabupaten Bogor, di mana target di tahun 2023 Puskesmas bisa terbentuk di seluruh desa dan kelurahan se-Kabupaten Bogor.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bogor, Hadijana mengatakan, pembangunan kesejahteraan sosial tentunya bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah melainkan juga tanggung jawab bersama. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Bogor terus mengembangkan sinergi,

kolaborasi dan menggandeng mitra kerja dengan lembaga kesejahteraan sosial.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Bogor saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada lembaga amil zakat (LAZ) Rabbani yang telah membantu penyuluhan kebutuhan sosial melalui Graha Pancakarsa," ungkapnya.

Hadijana menambahkan, bantuan diperuntukkan untuk warga Kabupaten Bogor yang sangat membutuhkan dan diberikan kepada warga yang

sudah melalui proses verifikasi.

"Kita bersama-sama Lembaga Amil Zakat dan Dinsos Kabupaten Bogor menyalurkan bantuan kepada masyarakat. Kami berharap banyak lembaga-lembaga yang memang sangat peduli kepada sesama khususnya di Kabupaten Bogor sehingga warga dan masyarakat yang masih membutuhkan ini bisa kita tangani lebih banyak lagi," tandasnya.

Sementara, Ketua Dewan Pengawas Syariah Lembaga Amil Zakat (LAZ) Rabbani, Ustadz Erwandi Tarmizi me-

nyatakan, bantuan ini diperuntukkan bagi masyarakat Kabupaten Bogor yang membutuhkan.

"Alhamdulillah kita dibantu oleh Dinas Sosial Kabupaten Bogor untuk memudahkan penyaluran bantuan ini, dan terima kasih atas kerjasama yang baik dari pihak Pemerintahan Daerah terutama Kabupaten Bogor dan Dinas Sosial dan dari semua yang terkait di lembaga ini untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat semoga bermanfaat," imbuhnya. ● **gio**

## BPK Jabar Serahkan LKPD ke Pemkab Bogor

**BOGOR (IM)**- Plt. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021, secara langsung kepada Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan di Bandung, Senin (1/8).

Dalam kesempatan ini dari hasil pemeriksaan BPK Provinsi Jabar, Pemerintah Kabupaten Bogor mendapatkan kategori Wajar Dengan Pengecualian (WDP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021. Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengungkapkan, Pemkab Bogor telah berusaha dengan maksimal untuk menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akutansi Pemerintahan.

Namun demikian tentunya masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu disempurnakan dan harus ditindaklanjuti dengan sungguh-sungguh demi perbaikan ke depan.

"Kami sangat berterima kasih kepada tim pemeriksa dari BPK-RI atas segala rekomendasi dan masukannya selama masa pemeriksaan, dan sangat berguna bagi peningkatan kualitas laporan keuangan dan perbaikan sistem pengendalian intern serta kepatuhan terhadap perundang-undangan pada tahun yang akan datang," ujarnya.

Untuk diketahui bahwa, pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 terinci dilaksanakan dalam dua tahap. Pemeriksaan pertama dilaksanakan dari tanggal 28 Maret sampai 26 April 2022

dan tahap kedua dilaksanakan dari 17 Mei sampai dengan 1 Juli 2022.

"Kami juga berterima kasih atas dukungan DPRD Kabupaten Bogor serta seluruh perangkat daerah yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan Pemkab Bogor. Kami akan melakukan perbaikan administrasi, peningkatan pengawasan dengan membuat tim pengawas sebagai bentuk komitmen Pemkab Bogor agar kedepan jauh lebih baik. Kami juga telah menyusun rencana aksi untuk menindaklanjuti temuan-temuan pemeriksaan tersebut," terangnya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Romli menambahkan bahwa DPRD Kabupaten Bogor senantiasa mendukung baik pengawasan maupun rekomendasi dalam mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah. ● **gio**

## UNTUK MENUNJANG PENGEMBANGAN BISNIS

# Perumda Tirta Pakuan Lakukan Perombakan Pejabat

**BOGOR (IM)**- Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor menggelar pelantikan, alih fungsi tugas dan pengukuhan pegawai di ruang rapat utama atau command center kantor Siliwangi, Sukasari, Kecamatan Bogor Timur pada Selasa (2/8).

Hal ini dilakukan Perumda Tirta Pakuan guna menunjang pengembangan bisnis yang mulai diijak dan adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

Pelantikan, alih fungsi tugas dan pengukuhan pegawai dipimpin Direktur Utama Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor, Rino Indira Gusniawan dan dihadiri Direktur Umum, Rivelino Rizki dan Direktur Teknik, Ardani Yusuf.

Hadir pula Sekretaris Daerah Kota Bogor yang juga Ketua Dewan Pengawas Tirta Pakuan, Syarifah Sofiah Dwikorawati serta anggota Dewan Pengawas, Dodi Rosadi dan Hanafi.

Dirum Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor, Rivelino Rizki mengatakan, pelantikan pejabat struktural ini dihasilkan dari kajian analisa beban kerja masing-masing departemen dan sub departemen yang dilakukan sejak Januari 2022.

"Kami sebelumnya sudah melakukan kajian dari bulan Januari 2022 terkait analisa beban kerja untuk melihat jabatan atau posisi mana yang tugasnya lebih berat, lebih ringan dan sebagainya. Maka kami bertiga berusaha menyusun SOTK ini sesuai dengan beban kerja masing-masing, jadi secara proporsional mas-

ing-masing tugasnya," ungkap Rivelino kepada wartawan.

Rivelino melanjutkan, secara keseluruhan untuk jumlah baik departemen atau manager dan sub departemen atau asisten manager tidak ada perubahan. Yakni 11 departemen dan 35 sub departemen. Namun, ada penggabungan dan penambahan pada sub departemen.

"Dari sisi jumlah untuk manager tidak ada perubahan tetap 11 orang, begitu juga asisten manager berjumlah 35 orang, bahkan ada sub departemen yang tadinya terbagi tiga menjadi satu, tapi ada juga yang ditambahkan karena sekarang kami fokus juga untuk peningkatan pendapatan dengan membuat unit usaha baru, makanya ada sub departemen atau asisten manager pengembangan usaha dan aset," beber Rivelino.

Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah Kota Bogor yang juga Ketua Dewan Pengawas Tirta Pakuan, Syarifah Sofiah Dwikorawati memaparkan, banyak target dan kinerja yang harus dicapai Direksi Tirta Pakuan Kota Bogor, karena itu kemarin sudah melakukan evaluasi visi dan target. Hasilnya ternyata diperlukan perombakan.

"Jadi bisa diketahui dengan evaluasi ini, prioritasnya yang mana. Ada jabatan tetap tapi nama berubah dan ada juga yang rotasi. Mudah-mudahan kinerja kedepan tercapai, karena target luar biasa. Apalagi akan ada pemanfaatan aset-aset Tirta Pakuan yang akan dijadikan objek wisata," pungkasnya. ● **gio**



Plt Bupati Bogor menerima LKPD dari BPK Jabar.